

MEMAKNAI PASANG SURUT BERDEMOKRASI DI MYANMAR (1962-2021) DAN KONTEKSNYA BAGI PENDEWASAAN DEMOKRASI ASEAN

Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani¹, Marsudi¹, Mutiara Syafira Anastasia¹, Dean Andi Alfianto²,
Faruq Setya Wargi², Bhisma Rizqi Anggara³, Afghani Trisna Ramadhan⁴, Okada Ali⁵

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

³Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

⁴Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

⁵School of Language and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies

e-mail: zofranosultani94@gmail.com, afghanitr@gmail.com, dan marsudi.fis@um.ac.id

Abstrak-Tujuan artikel ini adalah menganalisis proses demokratisasi di Myanmar dalam pemaknaan pendewasaan demokrasi ASEAN (1962-2021). Kudeta kepada Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint tanggal 1 Februari 2021 di Myanmar menunjukkan negara ini masih dicengkram oleh kekuatan militer Myanmar (*Tatmadaw*) dalam menguasai perpolitikan dan pemerintahan. Tampaknya militer di Myanmar “mengamankan” posisi kekuasaannya dengan berlindung di balik jubah demokrasi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kudeta di Myanmar memperlihatkan wajah demokrasi ASEAN yang sedang mencari corak tersendiri akan pemahaman bagaimana demokrasi membawa kesejahteraan dan keadilan sosial dan juga mengayomi militer ke dalam kekuasaan politik sipil dalam mempertahankan negara dari agresi eksternal kepada otoritas sipil di bidang politik dan pemerintahan.

Kata kunci: *Demokrasi, Myanmar, Militer, ASEAN*

INTERPRETING DEMOCRATIC TIDES IN MYANMAR (1962-2021) AND THEIR CONTEXT FOR THE MATURING OF ASEAN DEMOCRACY

Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani¹, Marsudi¹, Mutiara Syafira Anastasia¹, Dean Andi Alfianto²,
Faruq Setya Wargi², Bhisma Rizqi Anggara³, Afghani Trisna Ramadhan⁴, Okada Ali⁵

¹Faculty of Social Sciences, State University of Malang

²Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya

³Faculty of Letters, State University of Malang

⁴Faculty of Humanities, University of Indonesia

⁵School of Language and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies

e-mail: zofranosultani94@gmail.com, afghanitr@gmail.com, and marsudi.fis@um.ac.id

Abstract-The purpose of this article is to analyze the democratization process in Myanmar in terms of the maturing meaning of ASEAN democracy (1962-2021). The coup against Daw Aung San Suu Kyi and President Win Myint on February 1, 2021 in Myanmar shows that this country is still in the grip of the Myanmar military force (*Tatmadaw*) in controlling politics and government. It seems that the military in Myanmar is “securing” its position of power by hiding itself under the cloak of democracy. The research method uses library research methods. The results show that the coup in Myanmar shows the face of ASEAN democracy which is looking for its own style of understanding how democracy brings welfare and social justice and also nurtures the military into civilian political power in defending the country from external aggression to civilian authorities in politics and government.

Keywords: *Democracy, Myanmar, Military, ASEAN*

Pendahuluan

Pada 1 Februari 2021, dunia dan ASEAN dikejutkan oleh kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Min Aung Hlaing dari militer Myanmar. Tatmadaw menangkap Presiden Win Myint dan Daw Aung San Suu Kyi bersama dengan anggota lainnya atas tuduhan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada November 2020. Aung San Suu Kyi sebelumnya telah dibebaskan dari tahanan rumah pada 2011 oleh Presiden Jenderal Thein Sein. Dalam beberapa jam setelah penangkapannya, Myawaddy TV, yang dikelola oleh militer Myanmar, mengumumkan bahwa Jenderal Min Aung Hlaing bersama militer telah mengambil alih kendali Myanmar dan memberlakukan keadaan darurat di Yangon dan Naypyidaw (Puteri, 2021).

Menurut Donald M. Seekins (2017, p. 430), Tatmadaw terdiri dari tiga angkatan bersenjata: Angkatan Darat (Tatmadaw Kyi), Angkatan Laut (Tatmadaw Yay), dan Angkatan Udara (Tatmadaw Lei), yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Republik Persatuan Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Senior Than Shwe pada 2005. Kementerian Pertahanan bertindak sebagai departemen pemerintah serta markas komando terpadu untuk Tatmadaw. Di bawah Daw Aung San Suu Kyi yang terpilih sebagai State Counselor pada 2015, Myanmar mengalami kemajuan di tingkat ASEAN dan global. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5% tercatat selama 2012-2016, reformasi ekonomi berjalan lambat, dan infrastruktur yang terbatas tetap menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi, seperti yang dilaporkan oleh World Bank (2017) yang menunjukkan hanya 37% penduduk yang memiliki akses listrik.

Pertanian adalah penyumbang PDB (*Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product* (GDP)) terbesar (lebih dari 35% pada tahun 2014) dan mempekerjakan lebih dari 65% populasi, tetapi sektor perminyakan kemungkinan akan memainkan peran utama dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, di tingkat global, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada mencabut embargo perdagangan dan ekonomi dengan Myanmar. Meskipun telah membawa hasil yang positif yang dilakukan Aung San Suu Kyi, negeri itu kembali disorot oleh dunia internasional mengenai penanganan kesejahteraan dan diskriminatif terhadap etnis Rohingya di Arakan State [sekarang bernama Rakhine State], Myanmar yang dilakukan oleh rezim junta militer (*military junta regime*). Tampaknya militer di Myanmar “menga-mankan” posisi kekuasaannya dengan berlindung di balik jubah demokrasi dan “mengontrol” pemerintahan demokratis Daw Aung San Suu Kyi untuk patuh pada “intruksi” militer atas nama “persatuan dan kesatuan” bangsa Myanmar.

Kudeta militer Myanmar mengingatkan memori politik masyarakat global mengenai sepak terjang keikutsertaan militer di dalam perpolitikan nasional negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, dan Filipina. Apa yang terjadi di Myanmar di tahun 2021 memberikan pemahaman rasional bahwa di dalam berdemokrasi pada negara-negara berkembang tidaklah semudah seperti Amerika Serikat dan Eropa yang *notabene* secara struktur sosial dan politik sudah mapan sejak Perjanjian Westphalia 1648. Demokrasi di negara-negara berkembang seperti Myanmar sedang mencari corak tersendiri akan pemahaman bagaimana demokrasi membawa kesejahteraan dan keadilan sosial dan juga mengayomi militer untuk berebut kursi kekuasaan dalam kontestasi berdemokrasi.

Penelitian revelan dari permasalahan penelitian yaitu Gwen Robinson, Yuichi Nitta, dan Thompson Chau (2021) mengenai demo-krasi yang diinterupsi oleh pihak *Tatmadaw* dalam melindungi kekuasaan dan melegi-timasi militer. Selain itu, Andrew Selth (2020) yang menjelaskan demokrasi di Myanmar adalah pemahaman militer menggunakan “demokrasi” untuk tujuan meraih kekuasaan dan mempertahankan persatuan negara. Namun, Josef Silverstein (2004) memaparkan perjuangan Myanmar meraih demokrasi pascakolonial melalui penggunaan militer meskipun pelaksanaan demokrasi di sana ber-sifat semu. David I. Steinberg (2013) melihat Myanmar sedang dalam proses transisi dari pemerintahan kolonial Inggris ke pemerint-tahan demokrasi militeristik dalam menye-suaikan nilai-nilai demokrasi Barat. Terlepas dari itu semua, urgensi dari penelitian ini yaitu masalah kudeta Myanmar tahun 2021 oleh Jenderal Min Aung Hlaing telah mencederai pemaknaan militer mengenai demokrasi, ketika November 2020, negeri ini mengadakan pemilihan elektoral yang demokratis dengan dalih terjadi kecurangan yang sistematis dan terstruktur oleh pendukung partai NLD dan Daw Aung San Suu Kyi. Bagaimanapun juga, kemunculan kudeta tahun 2021 sangat merusak proses berdemo-krasi di Myanmar, dimana negara

ini telah mengagenda *settingkan* demokrasi di dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kepentingan publik Myanmar untuk mewujudkan iklim demokrasi di negeri tersebut.

Permasalahan tulisan ini adalah kudeta 2021 di Myanmar membawa penyesuaian dan pendalaman berdemokrasi melalui kekuasaan *Tatmadaw* yang selama ini adanya kebutuhan memahami dan menuntaskan konteks demo-kratisasi untuk mendemokrasikan negeri itu. Tulisan ini memiliki tujuan yaitu menganalisis bagaimana corak demokrasi di Myanmar terhadap pendewasaan ASEAN memaknai demokrasi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Myanmar yang baru saja “menghirup udara demokrasi” selama 5 tahun, pada akhirnya kembali hidup di penjara kemiliteran karena begitu kuatnya pengaruh militer berkuasa di pemerintahan dan politik Myanmar. Di dalam tulisan ini, peneliti menggunakan tanda baca “[]” sebagai tanda perubahan nama dalam bahasa Burma karena tahun 1989 terjadi perubahan ejaan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Ada-pun langkah-langkahnya yaitu peneliti men-cari sumber-sumber yang relevan di perpustakaan. Data pustaka sudah siap pakai diha-dapan peneliti. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, menyusun bibliografi terlebih dahulu yang menunjang masalah pene-litian terutama sebuah sumber/referensi yang relevan bagi peneliti, dan membaca sumber-sumber yang relevan sesuai masalah pene-litian. Tujuannya yaitu untuk memahami dan menemukan informasi yang sesuai permasalahan yang peneliti ingin dijelaskan (Zed, 2014, pp. 16-23)

Kepustakaan dapat berupa buku, jurnal, majalah, internet, tesis, skripsi, disertasi, laporan penelitian, dan beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan dan permasalahan dalam artikel penelitian. Pengumpulan sumber/pustaka dilakukan pada bulan Oktober 2019-September 2020 sebelum dan sesudah merebaknya pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease-2019*) di Indonesia dan ASEAN. Pengumpulan sumber ini dilakukan dengan menelaah temuan dari berbagai literatur dan mengkritisi melalui pemberian gagasan kritis dalam hasil pene-litian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan mengkolaborasikan dan mensinte-siskan berdasarkan masalah penelitian. Gagasan kritis dari permasalahan penelitian adalah kudeta tahun 2021 di Myanmar mem-bawa pendewasaan demokrasi ASEAN dalam memaknai dan menyikapi proses demokrasi dan demokratisasi yang mengupayakan pem-bangunan dan kesejahteraan sosial terlepas militer atau sipil menguasai politik dan pemerintahan.

Pengumpulan sumber di masa pan-demi COVID-19 menerapkan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI dan *World Health Organization* (WHO). Penger-jaan artikel dilakukan dari bulan November 2019-Maret 2021 dan berada di Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Malang, Perpustakaan Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, Laboratorium Historiografi dan Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang (UM), dan Perpustakaan Tokyo University of Foreign Studies. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya (Sari & Asmendri, 2020, p. 45). Instrumen penelitian yang digunakan bisa berupa daftar *checklist* klasifikasi bahan pene-litian, membuat dan menyusun terlebih dahulu melalui daftar rujukan/bibliografi, skema/peta penulisan, dan format catatan penelitian di buku, kertas, atau *binder*.

Sumber yang telah dikumpulkan se-lanjutnya dibaca dan diketik di *Microsoft Word 2017*. Membaca data yang telah dikum-pulkan dengan lebih terperinci, terurai, dan menangkap esensi dari data tersebut sesuai permasalahan. Bisa juga menangkap intisari dari bahan bacaan kemudian peneliti membuat ringkasan. Bacaan yang telah diketik di *Microsoft Word 2017* kemudian dilakukan analisis isi sebagai teknik pengumpulan data. Analisis isi digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan permasalahan.

Dalam analisis ini dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai informasi sebagai data yang relevan menjadi sebuah fakta. Untuk menjaga

ketelitian proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi misinformasi maka dilakukan pengecekan antarpustaka (Sari & Asmendri, 2020, p. 47). Maka, validasi data dari penelitian kepustakaan yaitu apakah in-formasi-informasi dari sumber-sumber/*lite-racy* yang dikumpulkan sudah sesuai dengan fokus dan tujuan permasalahan yang menjadi interpretasi atas problematika suatu peristiwa dan fenomena sosial bahwa berdemokrasi di Myanmar dari tahun 1962-2021 ditafsirkan sebagai “berdemokrasi ala militer”.

Hasil dan Pembahasan

A. Sepak Terjang Keikutsertaan Militer Myanmar (*Tatmadaw*) dalam Berdemo-kraasi di Myanmar (1962-2016)

1. Kudeta Pertama oleh Jenderal Ne Win tahun 1962

Sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar telah menjadi pusat konflik antara kekuatan komunis, nasionalis, tentara, etnis minoritas, dan pemerintah nasional, sehingga tidak mengherankan jika kepemimpinan negara tersebut didominasi oleh militer, atau *Tatmadaw*, yang enggan kehilangan pengaruhnya dalam politik, pemerintahan, sosial, dan ekonomi Myanmar. *Tatmadaw*, di bawah Jenderal Ne Win, menggulingkan pemerintahan sipil U Nu pada tahun 1962 dan memasang rezim otoriter dengan dalih menjaga keamanan nasional, setelah sebelumnya Myanmar sempat terlibat dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 sebelum akhirnya menutup diri dari perpolitikan global (Taylor, 1988, pp. 41-42; Lentz, 1996, p. 566; Steinberg, 2013, p. 38).

Reaksi mahasiswa terhadap kudeta militer *Tatmadaw* sebelum 1962 penting dalam sejarah Myanmar, di mana sekitar 2.000 mahasiswa berdemonstrasi pada 7 Juli 1962, dan lebih dari 100 orang tewas akibat tindakan keras militer, meskipun pemerintah hanya mengakui 15 kematian (Steinberg, 2013, p. 64). Kudeta ini dipimpin oleh Jenderal Ne Win, yang memanfaatkan *Tatmadaw* untuk menguatkan kekuasaan militer dan memperkuat ekonomi sosialis dengan menghilangkan dominasi asing dan pemerintahan sipil yang dianggap korup. Ne Win menjadi Ketua Dewan Revolusi sejak 1962, Presiden Burma dari 1974 hingga 1981, dan Ketua Partai Program Sosialis Burma (BSPP), yang awalnya hanya terdiri dari perwira militer tetapi kemudian berkembang menjadi partai besar dengan ribuan anggota dan simpatisan, dengan 29% calon anggota berasal dari *Tatmadaw* pada 1966 (Steinberg, 2013, p. 66; Taylor, 2009).

2. Kebijakan Politik Jenderal Ne Win di dalam Perpolitikan dan Pemerintahan Myanmar Pasca Kudeta Pertama 1962

Pada masa pemerintahan Jenderal Ne Win (1962-1988), Myanmar menerapkan konsep "Burmese Way to Socialism," yang mengendalikan keragaman etnis dengan tangan besi, terutama melalui lembaga militer seperti SPDC dan SLORC yang kemudian berubah setelah peristiwa 8888 Uprising. Kebijakan ini mencakup nasionalisasi perekonomian, pembatasan hak-hak kepemilikan oleh warga non-Burma, terutama etnis Cina dan India, serta pengenalan 1982 Citizenship Law yang mengklasifikasikan warga negara menjadi tiga kategori: kewarganegaraan penuh, asosiasi, dan naturalisasi, dengan tujuan mempertahankan dominasi etnis Burma dalam politik dan ekonomi. Kebijakan diskriminatif ini menyebabkan eksodus besar-besaran orang Cina Burma dan penindasan terhadap etnis minoritas lainnya, termasuk Rohingya, yang tetap tidak diakui sebagai warga negara dan menjadi kelompok paling terpinggirkan di Myanmar (Fan, 2012; Steinberg, 2013, pp. 73-74; Smith, 1991, pp. 153-154; Singh, 2014; Maung, 1992, pp. 25-26).

Pengaruh Jenderal Ne Win tetap kuat meskipun ia mundur sebagai Presiden pada 1981, digantikan oleh U San Yu, melalui jaringan patron-klien yang dibangun dalam tubuh militer (*Tatmadaw*). Ne Win menerapkan prinsip

kepemimpinan "lukawn, lutaw" (orang baik sebelum orang pintar), memilih bawahan yang tidak terlalu pintar atau ambisius untuk menghindari ancaman terhadap kekuasaannya. Ne Win berhasil menjaga kekuasaannya dan pengaruhnya bahkan setelah masa jabatannya berakhir, dengan penerus-penerus yang setia kepadanya di dalam struktur militer, memastikan kesinambungan kebijakan yang diskriminatif dan kontrol militer yang ketat di Myanmar (Steinberg, 2013, p. 78; Seekins, 2017, p. 387).

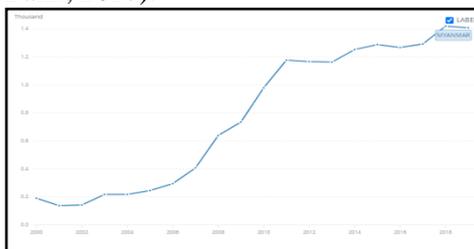
3. Para Pengganti Jenderal Ne Win dalam Meneruskan Legitimasi Tatmadaw dan Monopoli Lingkaran Kekuasaan Ne Win

U San Yu menjabat sebagai Presiden Myanmar dari 9 November 1981 hingga 27 Juli 1988, menggantikan Jenderal Ne Win yang tetap berkuasa melalui posisinya sebagai Ketua BSPP. Walaupun San Yu memiliki latar belakang militer, kekuasaannya tetap berada di bawah pengaruh Ne Win. Setelah San Yu, U Sein Lwin, yang merupakan pengikut setia Ne Win, menjabat sebagai presiden selama 16 hari pada 1988, tetapi kepemimpinannya memicu demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Pemberontakan 8888. Protes ini menyebabkan perubahan kekuasaan di Myanmar, meski junta militer tetap menguasai negara selama 22 tahun berikutnya, dengan dampak kekacauan dan protes yang menewaskan ribuan orang (Steinberg, 2013; Lentz, 1996; Eggers, 2018).

Pasca Pemberontakan 8888, Aye Ko dan Dr. U Maung Maung, presiden boneka terakhir di bawah pengaruh Ne Win, menggantikan posisi kepresidenan. Sementara Maung Maung diharapkan dapat meredakan ketegangan politik, langkah tersebut hanya menjadi formalitas. Pemerintahan junta militer, yang dipimpin oleh Jenderal Saw Maung dan kemudian Jenderal Than Shwe, berusaha memperbaiki citra militer dan stabilitas dalam negeri melalui berbagai kebijakan dan pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Than Shwe, Myanmar mengalami pembangunan infrastruktur besar-besaran dan berusaha mencapai stabilitas ekonomi, meskipun negara tetap miskin dengan PDB per kapita terendah di Asia Tenggara. Meski ada kemajuan, konstitusi yang didominasi militer menghalangi perubahan signifikan, mencerminkan kendali militer yang ketat dan dampak dari pemerintahan junta yang panjang (Seekins, 2017; Rogers & Woodrum, 2010; Fisher, 2015; Sekarwati, 2021).

B. Pencapaian dan Kemajuan Politik Ekonomi Myanmar di tingkat ASEAN dan Global di bawah Daw Aung San Suu Kyi.

Ekonomi Myanmar adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan PDB/GDP nominal US\$ 76,09 miliar pada 2019 (lihat gambar 1) dan perkiraan PDB yang disesuaikan dengan daya beli sebesar US\$ 327,629 miliar pada 2017 menurut Bank Dunia (World Bank, 2017).



Gambar 1. Grafik GDP (*Gross Domestic Bruto*) Myanmar (2000-2019).
 (Sumber:

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=MM>).

Pada gambar 1 menunjukkan grafik GDP/PDB Myanmar mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2000 berkisar US\$ 190.606 meningkat ke US\$ 1.407.178. Di tingkat

ASEAN, Myanmar pada tahun 2015 menyumbangkan GDP US\$ 59,8 miliar atau 2,4% GDPnya bagi ASEAN di tahun 2015 (lihat tabel 1). Pada tabel 1, memperlihatkan Myanmar di tahun 2018 hanya mampu meraih US\$ 77,3 miliar dengan hanya 2,6% dari GDPnya bagi ASEAN sama seperti Kamboja dan Republik Demokratik Rakyat Laos yang juga memperoleh pangsa pasar sebesar 0,2-0,5% (The ASEAN Secretariat Community Relations Division (CRD), 2019, p. 7).

Tabel 1. *Gross Domestic Product (GDP) Ekonomi Negara-negara ASEAN 2015 dan 2018*

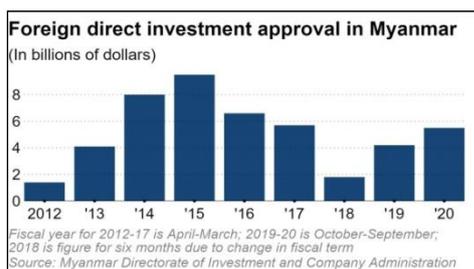
No	Country	Nominal GDP	
		USD in billion	
		2015	2018
1	Brunei Darussalam	12.9	13.6
2	Cambodia	18.1	24.6
3	Indonesia	855.0	1,041.6
4	Lao PDR	14.4	18.1
5	Malaysia	299.5	358.4
6	Myanmar	59.8	77.3
7	Philippines	292.5	342.7
8	Singapore	308.0	364.1
9	Thailand	401.7	505.1
10	Vietnam	193.6	241.0

(Sumber: The ASEAN Secretariat Community Relations Division (CRD), 2019, p. 7).

Kenaikan pada GDP ekonomi Myanmar serta Kamboja dan Laos merupakan kerja pemerintah masing-masing negara dengan menyelaraskan ratusan standar dan persyaratan teknis pada berbagai produk, mulai dari peralatan listrik dan elektronik, produk berbahan dasar karet, alat kesehatan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, hingga antara lain produk otomotif sebagai fasilitasi perdagangan antarnegara ASEAN. Inisiatif fasilitasi perdagangan antara lain *ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators (ASTFI)* yang diadopsi pada tahun 2017 dan dirancang untuk mengukur dan memantau pelaksanaan langkah-langkah fasilitasi perdagangan di seluruh wilayah ASEAN (The ASEAN Secretariat Community Relations Division (CRD), 2019, p. xiv). Inisiatif tersebut terus ditingkatkan melalui harmonisasi standar, pengembangan dan implementasi *Mutual Recognition Arrangements (MRA)*, dan harmonisasi rezim regulasi masing-masing pemerintahan negara anggota terhadap digitalisasi dan kemajuan teknologi baru sebagai integrasi layanan merupakan kunci keberhasilan integrasi ekonomi ASEAN 2020.

Keberhasilan itu juga di dukung oleh laporan Aung Hla Htun (16 Maret 2012) memaparkan bahwa untuk estimasi tahun 2020, PDB per kapita di Myanmar akan menjadi US\$ 5.142,20 dalam PPP (*purchasing power parity*) per kapita dan US\$ 1.608,50 dalam nominal per kapita. Dengan begitu, orang asing dapat menyewa secara legal tetapi tidak memiliki properti di Myanmar untuk memproteksi pengusaha, investor domestik, ataupun kegiatan ekonomi lokal. Investasi publik harus dilengkapi dengan kebijakan sisi penawaran untuk memastikan efisiensi dan kualitas layanan publik dan kebijakan sisi permintaan untuk menghindari perilaku *moral hazard* dan pemborosan (Zhuang, 2020, p.78).

Pada Desember 2014, Myanmar mendirikan Bursa Efek Yangon sebagai langkah awal untuk menarik investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonominya, yang didorong oleh sektor formal dan informal, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,5% selama 2012-2016 (Vakulchuk et al., 2017). Namun, sektor informal yang besar, terkait dengan korupsi dan perdagangan ilegal, serta ketimpangan alokasi sumber daya, menghambat kemajuan ekonomi. Meskipun demikian, pemerintah yang dipimpin NLD dan Aung San Suu Kyi berhasil menarik penanaman modal asing (PMA) hingga melampaui US\$ 5 miliar pada 2017, mencerminkan iklim investasi yang lebih terbuka dan transparan (Zhuang, 2020; Brown, 2005).



Gambar 2. Grafik *Foreign Direct Investment* (FDI) di Myanmar dari 2012-2020. (Sumber: Nitta, 2020).

Pasca pemerintahan U Thein Sein pada 2016, Myanmar di bawah Daw Aung San Suu Kyi mulai membuka diri terhadap investasi asing, dengan Komisi Investasi Myanmar menyetujui investasi sebesar US\$ 5,5 miliar pada tahun fiskal yang berakhir September 2020, meningkat 33% dari tahun sebelumnya (Nitta, 2020). Namun, pemerintah menghadapi kritik atas kurangnya transparansi, seperti dalam tender Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang kontroversial dan cenderung menguntungkan perusahaan Cina. Myanmar juga memperkuat hubungan dengan Thailand dan Cina, termasuk kerjasama ekonomi dan pembangunan infrastruktur di kawasan Greater Mekong Subregion dan Koridor Ekonomi Cina-Myanmar, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional dan mengembangkan pasar energi. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan kebutuhan untuk membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Stokke, Vakulchuk, & Øverland, 2018; Rieffel, 2012; Bolesta, 2018).

Kerjasama Myanmar dengan RRC merupakan bagian dari investasi utama RRC dalam infrastruktur di Asia Tenggara, termasuk proyek pertambangan, tenaga air, dan transportasi energi, menjadikan RRC sebagai investor asing terbesar di Myanmar pada 2011 dengan investasi kumulatif sekitar US\$ 13 miliar (Haacke, 2016, p. 6). Namun, elit politik-militer Myanmar menjadi tidak nyaman dengan ketergantungan ini, terutama dalam proyek strategis seperti ZEK Kyaukphyu dan KEK lainnya, yang sering kali mendapat dukungan dari negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa (Haacke, 2016, p. 11; Noorsy, Darmastuti, & Setiawan, 2016b, p. 251). Selain itu, reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan berdampak pada ketimpangan ekonomi, meskipun ada upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik (Aekapol Chongvilaivan, 2020, p. 94). Di masa pandemi COVID-19, pemerintah Myanmar juga mengimplementasikan jaring pengaman sosial untuk melindungi warga, sementara kerjasama internasional dengan Uni Eropa dan negara-negara ASEAN meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Hlaing, 2020; Zhuang, 2020, p. 56).

C. Kudeta Militer Myanmar 2021 bagi Pendewasaan Demokrasi ASEAN

1. Carut-Marut Pemilu 2020 dan Kudeta Militer Tahun 2021

Pada tahun 2020, Myanmar mengadakan pemilu nasional yang menandai keinginan rakyat untuk melanjutkan reformasi demokrasi, meski di tengah pandemi COVID-19. Pemilu ini menghasilkan kemenangan besar bagi National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Daw Aung San Suu Kyi dengan perolehan 83% suara. Namun, hasil ini diprotes oleh militer, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, yang mengklaim adanya kecurangan pemilu. Militer kemudian melakukan kudeta terhadap Presiden Win Myint dan Suu Kyi pada awal 2021, mengambil alih kekuasaan dengan alasan menjaga stabilitas nasional, meski hal ini lebih didorong oleh ambisi pribadi Min Aung Hlaing yang akan memasuki masa pensiun pada pertengahan 2021 (Erdhieta Ghaisani Puteri, 2021; Nyein et al., 2020).

Militer Myanmar, yang memiliki hak veto dalam amandemen konstitusi dan mengendalikan tiga kementerian utama, juga memanfaatkan jaringan bisnis

besar di berbagai sektor ekonomi, termasuk industri batu giok dan ruby, tembakau, dan pariwisata (Cahyani, 2021). Kudeta ini mengejutkan ASEAN dan komunitas internasional, yang sedang fokus menangani pandemi COVID-19. Pemilu 2020 di Myanmar menunjukkan keinginan rakyat untuk perubahan, namun kudeta ini menandai ketegangan antara aspirasi demokrasi dan kekuatan militer yang telah menguasai Myanmar selama beberapa dekade (Nyein Nyein et al., 2020; Ika Nur Cahyani, 2021).

2. *Demonstrasi Rakyat dan Krisis Sosio-Politik di Myanmar Pasca Kudeta 2021*

Dari masalah tersebut sangat terlihat bahwa *Tatmadaw* tidak mau kehilangan kendali kekuasaan politik di pemerintahan dan mengalami degradasi rasa hormat di mata masyarakat pasca kepemimpinan Jen-deral Thein Sein yang mengalihkan kekuasaan politik ke masyarakat sipil. Pada kasus kudeta di Myanmar ini, terungkap karakter gerakan nasionalis dan politik pasca kemerdekaan yang hingga kini masih kabur termasuk perjuangan demokratisasi di bidang politik dan pemerintahan maupun sosial dan ekonomi negara melalui kendaranya militer. Akibat masih kaburnya gerakan nasionalis demokratis maka di saat kudeta militer di Myanmar pun, gerakan politik pro demokratis yang menggerakkan puluhan ribu orang melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan dalam protes massal pertama sejak kudeta tidak mampu “merubuhkan tembok militeristik Myanmar” saat militer memutuskan akses internet dan membatasi saluran telepon.

Para demonstran membawa poster Aung San Suu Kyi sambil memakai masker bergambar Partai NLD. Seperti yang ditulis oleh jurnalis Larasati Dyah Utami (2021), pendemo melakukan kerumunan besar-besaran dari seluruh penjuru Yangon berkumpul di Kotapraja Hledan. Demonstrasi ini menyebabkan lalu lintas macet dan ekonomi hampir dipastikan lumpuh. Aktivis pro demokrasi dan pemprotes akhir 1980-an yang ditangkap oleh junta militer Myanmar, Thu Thu (dalam Utami, 2021) mengungkapkan “*Mereka sudah mulai mematikan internet, jika mereka lebih berkuasa, mereka akan lebih menekan pada pendidikan, bisnis, dan kesehatan di Myanmar*”. Tentu dampak kudeta ini mengganggu kinerja Myanmar mengatasi masalah buta huruf, kemiskinan, pengangguran, dan penanganan COVID-19.

Sebuah kampanye di media sosial yang menyerukan pengunjuk rasa untuk secara sengaja memblokir jalan-jalan di kota utama negara itu mulai mendapat perhatian besar dari Jenderal Min Aung Hlaing dan *Tatmadaw* pada Rabu pagi 17 Februari 2021. Tujuannya tampaknya adalah untuk menghen-tikan pegawai negeri pergi bekerja dan juga menghambat pergerakan pasukan keamanan menggunakan tindakan kekerasan.

Kampanye itu dijuluki "Hari Pemblokiran Jalan". Kampanye itu dalam laporan BBC News Indonesia (2021a) telah mengumpul-kan banyak unggahan gambar di internet yang menampilkan mobil-mobil di jalan-jalan utama dengan kap dan bagasi yang terbuka sehingga jalan tidak dapat dilalui. Sejumlah bus umum berhenti dan memblokir beberapa persimpangan jalan di Yangon.

Protes tersebut adalah perkembangan terbaru dari gerakan pembangkangan sipil yang meningkat sejak 1988 dan 2007, yang juga melibatkan aksi mogok dari para dokter dan guru, serta pemboikotan berbagai produk dan layanan milik militer yang dikuasai *Tatmadaw* pasca kudeta Februari 2021. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan dan merusak legitimasi rezim baru, Jenderal Min Aung Hlaing. Para pengunjuk rasa turun ke jalan di seluruh negeri lagi.

Di dalam laporan BBC News Indonesia (2021a), 2 orang pengunjuk rasa ditembak mati ketika polisi menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa. Kasus tertembaknya 2 orang demonstran me-nunjukkan bahwa terjadi intimidasi kepada pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi secara damai namun dihalang-halangi oleh polisi dan militer Myanmar yang menggun-kan kekerasan.

Secara hukum, pihak berwenang Myanmar telah mengambil langkah yang tepat terhadap pelanggaran yang mengganggu, mencegah, dan menghancurkan stabilitas negara, keamanan publik, dan supremasi hukum (*laws supremacy*).

Sejak awal berlangsung, unjuk rasa melibatkan berbagai kelompok, di antaranya para guru, dosen, pengacara, pejabat bank, dan pegawai pemerintah yang berkumpul di kota-kota di seluruh negeri di Myanmar. Mereka menyuarakan “akhiri pemerintahan junta militer”. Mereka melakukan demonstrasi sebagai bentuk menentang perebutan kekuasaan dan menuntut pihak militer menghormati hasil pemilu bulan November 2020.

Saat itu, wartawan BBC Nyein Chan Aye (dalam BBC News Indonesia, 2021a), di Yangon, mengatakan para biksu Buddha, anggota komunitas Muslim minoritas, pesepakbola negeri, dan bintang film dan musisi juga telah bergabung dalam protes anti kudeta, yang menurutnya akan menjadi lebih terorganisir seiring berjalannya waktu. Pada hari ke-4 demonstrasi massal, demonstran berhadapan dengan polisi yang menembakkan meriam air di Kota Bago. Pengunjuk rasa di Naypyidaw bahkan didukung seorang petugas polisi. Para pengunjuk rasa telah meminta petugas polisi untuk bergabung dengan tujuan mereka.

Selama ini *Tatmadaw* hanya membe-rikan hak politik istimewa kepada etnis Bamar maka semenjak kehadiran NLD di Myanmar memberikan ruang demokrasi bagi etnis minoritas lain di Myanmar. Ketika pemilu demokratis pertama diadakan di Myanmar bulan November 2020, etnis minoritas menggantungkan harapan kepada NLD untuk bisa meletakkan kandidat dari etnis minoritas di kursi Menteri Urusan Etnis. Nan Lwin (2020c) menentang prediksi bahwa ketidak-puasan masyarakat lokal terhadap janji yang diingkari partai yang berkuasa (*Union Solidarity and Development Party* (USDP)) sejak 2011-2016 akan membuatnya kehilangan beberapa kursi dari saingan partai di Kachin State yang tumbuh di dalam negeri. Liga Nasional untuk Demokrasi (*National League for Democracy*) mengambil sebagian besar kursi Persatuan Parlemen dan Parlemen Negara Bagian Kachin untuk diperebutkan di Kachin State pada Pemilu 2020.

Meskipun NLD mengambil sebagian besar kursi *Union Parliament*, partai tersebut kehilangan empat kursi di Majelis Rendah ke Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (*Union Solidarity and Development Party*) (USDP). USDP yang berpihak pada militer yang meliputi kota-kota Sumprabum, Mansi, Kawnglangphu dan Chipwe, dan satu kursi di Majelis Rendah untuk Partai Rakyat Negara Bagian Kachin (*Kachin State People's Party* (KSPP)) di Injangyang Township (Lwin, 2020c).

Kudeta yang dilakukan *Tatmadaw* pada Februari 2021, menurut Gwen Robinson, Yuichi Nitta, dan Thompson Chau (2021, p. 2) berdasarkan ketentuan konstitusional yang dimulai dengan Pasal 417. Min Aung Hlaing dapat mengumumkan keadaan darurat dan mengambil alih kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif tanpa batas waktu, meskipun pengumuman kudeta menjanjikan pemilihan setelah satu tahun pemerintahan darurat. Pasal konstitusi tersebut mengabadikan cengkraman militer dengan menetapkannya 25% dari semua kursi di parlemen negara bagian dan nasional dan 3 posisi kabinet kunci di pemerintahan dan keamanan. Diperlukan 75% suara untuk mengubah konstitusi, yang secara efektif memberikan hak veto kepada militer.

Adapula alasan lain yaitu mengacu kepada UU Kewarganegaraan 1982. UU itu memuat ketentuan yang melarang warga negara Myanmar yang memiliki pasangan atau anak asing juga menghalangi Daw Aung Suu Kyi. Mengapa demikian? karena Daw Aung San Suu Kyi memiliki anak-anak dan almarhum suaminya berkewarganegaraan Inggris Raya, untuk mendapatkan kursi kepresidenan, meskipun Daw Aung San Suu Kyi diakui secara luas sebagai pemimpin *de facto* negara tersebut akan sulit memperoleh jabatan presiden.

Perubahan signifikan pada konstitusi, meski merupakan tujuan lama partai NLD, sangat sulit dicapai. Hal ini kemungkinan akan tetap terjadi, membiarkan masalah politik dan pemerintahan berada di tangan angkatan bersenjata di masa mendatang.

3. *Jalan Terjal Demokrasi Myanmar bagi Pendewasaan Demokrasi ASEAN*

Kolaborasi antarperbedaan etnis di Myanmar saat ini terlihat kabur akibat penekanan berlebihan pada etnis sebagai penentu utama dalam politik, khususnya dalam Pemilu 2020. Robert H. Taylor (1988) menjelaskan bahwa pemerintahan Inggris meninggalkan kelemahan kelembagaan di Myanmar yang memperlambat kemajuan demokrasi. Setelah kemerdekaan, Myanmar menghadapi kekosongan kelembagaan yang diisi oleh militer, menggantikan institusi kolonial yang rapuh dengan struktur militer pasca-kemerdekaan yang memperkuat kontrol militer atas pemerintahan (Thant Myint-U, 2004).

Warisan nasionalisme etnis Bamar juga mempengaruhi transisi Myanmar ke pemerintahan yang dominan secara etnis dan religius. Tatmadaw, yang berakar pada nasionalisme yang lebih modern, mendominasi politik Myanmar dan membentuk sistem yang sangat terpusat pada identitas nasional. Setelah periode pemerintahan Jenderal Thein Sein yang menerapkan reformasi ekonomi, negara mengalami perubahan signifikan dalam investasi asing dan kemajuan ekonomi, meskipun masih terhambat oleh warisan otoritarianisme (Robinson, Nitta, & Chau, 2021; Larry Diamond, 2013).

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 2021 mencerminkan kegagalan implementasi demokrasi yang substansial. Intervensi militer di Myanmar dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seringkali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan militer lebih tertarik mempertahankan legitimasi kekuasaan daripada melakukan reformasi yang diperlukan. Kudeta ini mengabaikan konsensus dalam ASEAN Security Community Plan of Action (ASCPA) dan menyebabkan reaksi internasional berupa sanksi yang mungkin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Myanmar (Rizal Sukma, 2009; Beech, 2021).

Situasi di Myanmar menyoroti kebutuhan untuk transformasi demokratis yang lebih mendalam, dengan menekankan peran politik transformatif dan mobilisasi massa dalam membentuk demokrasi substantif. Hal ini mencakup pengembangan strategi bantuan demokrasi yang lebih komprehensif, di luar sekadar bantuan pembangunan ekonomi dan kerjasama bilateral. Demokrasi di Myanmar harus melibatkan representasi rakyat yang lebih substantif dan politik yang transformasional untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran yang lebih baik (Kristian Stokke & Olle Törnquist, 2013).

Simpulan

Proses berdemokrasi di Asia Tenggara tampaknya mengalami hambatan dalam memaknai apa itu *demos* dan *kratos*. Pada kasus berdemokrasi di Myanmar, demokrasi berjalan hampir mulus ketika tahun 2016 dengan terpilihnya Daw Aung San Suu Kyi sebagai *State Counselor of Myanmar*. Pada tahun tersebut menunjukkan ketiadaan pemerintah Myanmar dalam pendewasaan politik dengan mengadakan *good governance and development transparency*. Selama kepemimpinan pemerintahan sipil, Suu Kyi membawa *progress* bagi Myanmar di tingkat ASEAN maupun global. Namun, Myanmar tidak menikmati perubahan dari pendewasaan berdemokrasi dalam waktu yang lama. Sebab, junta militer sudah kerasan menikmati kekuasaan politik dan pemerintahan di Myanmar sejak tahun 1962. Solusi dari masalah ini adalah dialog yang damai dengan pihak yang bertikai tanpa mengajukan mengadakan pemilu ulang karena Pemilu 2020 adalah pemilu yang “dimenangkan” oleh rakyat Myanmar. Kasus kudeta di Myanmar menjadi pelajaran bagi Indonesia dan ASEAN untuk memaksimalkan demokrasi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bukan sebatas pemilihan elektoral semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abc.net.au. (2020, February 18). *China and Myanmar sign raft of deals as Xi Jinping courts an isolated Aung San Suu Kyi.*, <https://www.abc.net.au/news/2020-01-18/china-and-myanmar-sign-raft-of-deals,-xi-jinping-courts-suu-kyi/11880070>.
- BBC News Indonesia. (2021a, Februari 7). *Kudeta Myanmar: Apa makna 'Revolusi 2222' yang diikuti ratusan ribu orang untuk menentang perebutan kekuasaan ole militer.*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55968813>.
- BBC News Indonesia. (2021b, Februari 15). *Kudeta Myanmar: Ratusan ribu orang turun ke jalan dalam demonstrasi terbesar menentang militer (Tatmadaw).*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56065990>.
- Beech, H. (2021, February 1). Democracy hero? military foil? Myanmar's leader ends up as neither. *New York Times.*, <https://www.nytimes.com/2021/02/01/world/asia/myanmar-coup-aung-san-suu-kyi.html>.
- Bolesta, A. (2018). Myanmar-China peculiar relationship: Trade, investment and the model of development. *Journal of International Studies*, 11(2), 23-36.
- Brown, I. (2005). *A colonial economy in crisis: Burma rice cultivators and the world depression of the 1930s*. New York & Toronto: Routledge Curazon.
- Cahyani, I. N. (2021, Februari 7). *Analisis sebut kudeta Myanmar karena ambisi pribadi panglima militer yang merasa hilang rasa hormat.* (Editor: Sri Juliati). *Tribun News.com.*, <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/02/07/analisis-sebut-kudeta-myanmar-karena-ambisi-pribadi-panglima-militer-yang-merasa-hilang-rasa-hormat>.
- Chongvilaivan, A. (2020). Openness and inclusive growth in South-East Asia. In A. Triggs & S. Urata (Ed.). (2020). *Achieving inclusive growth in the Asia-Pacific* (pp. 87-102). Canberra: The Australian National University Press.
- Diamond, L. (2013). Why wait for democracy?. *The Wilson Quarterly*, 37(1), 1-8.
- Eggers, C. (2018, August 8). Myanmar's uprising unfinished. *Bowling Green Daily News (BG Daily News)*, https://www.bgdailynews.com/news/myanmars-uprising-unfinished/article_6e22cf40-d0a1-5efa-9666-4aecf5f4b242.html.
- Fan, H. (2012). The 1967 anti-Chinese riots in Burma and Sino-Burmese relations. *Journal of Southeast Asian Studies*, 43(2), 234-256.
- Fisher, J. (2015, Juli 15). Fakta penting pemilu Myanmar 2015. *BBC News Indonesia.*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150720_dunia_pemilu_myanmar.
- Haacke, J. (2016). *Myanmar's foreign policy under President U Thein Sein: Non-aligned and diversified.* (Trends in Southeast Asia No. 4). Singapore: Institute of Southeast Asia Studies (ISEAS) and Yusof Ishak Institute.
- Hlaing, T. (2020). Yangon begins cash payments to pandemic-affected workers not covered by welfare. *The Irrawaddy.com.*, <https://www.irrawaddy.com/specials/myanmar-covid-19/yanon-begins-cash-payments-pandemic-affected-workers-not-covered-welfare.html>.
- Htun, A. H. (2012, March 16). *Exclusive: Myanmar drafts new foreign investment rules.*, <https://www.reuters.com/article/2012/03/16/us-myanmar-investment-idUSBRE82FOIY20120316>.
- Huntington, S. P. (2003). *Prajurit dan negara: Teori dan politik hubungan militer-sipil.* (Penerjemah: Deasy Sinaga). Jakarta: PT Grasindo.
- Lentz, H. M. (1996). *Heads of states and governments since 1945: A worldwide encyclopedia of over 2,300 leaders, 1945 through 1992* (1st ed.). New York: Routledge.

- Lwin, N. (2020a, October 22). Myanmar signs up with EU's EuroCham (European Chambers of Commerce) for More Investment. *The Irrawaddy.com.*, <https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-signs-eus-eurocham-investment.html>.
- Lwin, N. (2020b, November 6). Myanmar's State Counselor, Thai Prime Minister (PM) agree to boost cooperation on trade, COVID-19. *The Irrawaddy.com.*, <https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-state-counselor-thai-pm-agree-boost-cooperation-trade-covid-19.html>.
- Lwin, N. (2020c, November 10). NLD performs strongly in Kachin state, dashing ethnic party's hopes. *The Irrawaddy.com.*, <https://www.irrawaddy.com/elections/nld-performs-strongly-kachin-state-dashing-ethnic-partys-hopes.html>.
- Maung, M. (1992). *Totalitarianism in Burma: Prospects for economic development*. New York: Paragon House.
- May, R. J., Lawson, S., & Selochan, V. (2004). Introduction: Democracy and the military in comparative perspective. In R. J. May & V. Selochan (Ed.). (2004). *The military and democracy in Asia and the Pacific* (pp. 1-28). Canberra: The Australian National University Press.
- Mydans, S. (1988). Man in the news: U Maung Maung; widely traveled leader for Rangoon. *New York Times*, August 20, 1988 Section 1, p. 3.
- Myint-U, T. (2004). *The making of modern Burma*. Cambridge, New York, Madrid, Port Melbourne, & Cape Town: Cambridge University Press.
- Nitta, Y. (2020, October 20). Myanmar's Suu Kyi projects 'Pro-Economy Image' before election., <https://asia.nikkei.com/Politics/Myanmar-election/Myanmar-s-Suu-Kyi-projects-pro-economy-image-before-election2>.
- Noorsy, I., Darmastuti, S., & Setiawan, D. (2016a). *Ketimpangan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA): Siapa mengorbankan apa* (Jilid 1). Depok: Universitas Indonesia Press.
- Noorsy, I., Darmastuti, S., & Setiawan, D. (2016b). *Ketimpangan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA): Apa mendominasi siapa* (Jilid 2). Depok: Universitas Indonesia Press.
- Nyein, N., Lwin, N., Aung, S. Y., & Htwe, Z. Z. (2020, November 11). Myanmar's 2020 general election results in numbers. *The Irrawaddy.com.*, <https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-2020-general-election-results-numbers.html>.
- Puteri, E. G. (2021, Februari 2). Heboh kudeta militer Myanmar, dominasi militer mewarnai sejarah pemerintahan Myanmar. *Berita Subang Pikiran Rakyat.*, <https://beritasubang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1331369579/heboh-kudeta-militer-myanmar-dominasi-militer-mewarnai-sejarah-pemerintahan-myanmar>.
- Rieffel, L. (2012). *The Myanmar economy: Tough choices*. (Global Economy & Development Working Paper 51 September 2012). Washington, D.C.: Global Economy and Development at The Brookings Institute.
- Robinson, G., Nitta, Y., & Chau, T. (2021). Democracy interrupted: Myanmar's military has toppled Aung San Suu Kyi's government. What happens now?. *The Big Story*, February 8-14, 2021: 1-4.
- Rogers, B., & Woodrum, J. (2010). *Than Shwe: Unmasking Burma's tyrant*. Chiang Mai: Silkworm Book Press.
- Santoso, P., & Tapiheru, J. (2017). Contextually-grounded democracy: Broadening pathways for democratization. *Power, Conflict, and Democracy Journal*, V(2), 211-239.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.

- Seekins, D. M. (2017). *Historical dictionary of Burma (Myanmar)*. (Historical Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East, No. 59). Maryland & Oxford: Scarecrow Press, Inc.
- Sekarwati, S. (2021, Februari 18). Profil Aung San Suu Kyi, jatuh bangun dalam politik Myanmar. *Tempo*., <https://dunia.tempo.co/read/1429839/profil-aung-san-suu-kyi-jatuh-bangun-dalam-politik-myanmar/full&view=ok>.
- Selth, A. (2020). *Interpreting Myanmar: A decade of analysis*. Canberra: The Australian National University Press.
- Silverstein, J. (2004). Burma's struggle for democracy: The army against the people. In R. J. May & V. Selochan (Ed.). (2004). *The military and democracy in Asia and the Pacific* (pp. 69-87). Canberra: The Australian National University Press.
- Singh, B. (2014). *Tantangan orang Rohingya Myanmar menghadapi satu minoritas teraniaya dan implikasi untuk keamanan nasional dan regional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (GMUP).
- Smith, M. (1991). *Burma: Insurgency and the politics of ethnicity*. London & New Jersey: Zed Books.
- Steinberg, D. I. (2013). *Burma/Myanmar: What everyone needs to know*. Oxford: Oxford University Press.
- Stokke, K., & Törnquist, O. (Eds.). (2013). *Democratization in the global south: The importance of transformative politics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Stokke, K., Vakulchuk, R., & Øverland, I. (2018). *Myanmar: A political economy analysis*. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) with Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
- Sukma, R. (2009). *Democracy building in South East Asia: The ASEAN security community and options for the European Union (EU)*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IIDEA).
- Taylor, R. H. (1988). An undeveloped state: The study of modern Burma's politics. In J. G. Taylor & A. Turton. (1988). *Sociology of "Developing Societies" Southeast Asia* (pp. 33-47). Hampshire & London: The Macmillan Press Ltd.
- Taylor, R. H. (2009). *The State in Myanmar*. London: C. Hurst & Company.
- The ASEAN Secretariat Community Relations Division (CRD). (2019). *ASEAN integration report 2019*. (Annual Report in October 2019). Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Utami, L. D. (2021, Februari 7). Puluhan ribu masyarakat Myanmar turun ke jalan protes kudeta militer di hari kedua. (Editor: Hendra Gunawan). *Tribun News.com*., <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/02/07/puluhan-ribu-masyarakat-myanmar-turun-ke-jalan-protos-kudeta-militer-di-hari-kedua>.
- Vakulchuk, R., Hlaing, K. K., Naing, E. Z., Øverland, I., Suryadi, B., & Velautham, S. (2017). *Myanmar's attractiveness for investment in the energy sector: A comparative international perspective*. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).
- World Bank. (2017). *The World Bank in Myanmar*. Washington, D.C. & Yangon: World Bank (WB)., <http://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview>.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan* (Cetakan ke-2). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zhuang, J. (2020). Rising inequality amid rapid growth in Asia and implications for policy. In A. Triggs & S. Urata (Ed.). (2020). *Achieving inclusive growth in the Asia-Pacific* (pp. 55-86). Canberra: The Australian National University Press.